

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan berbagai agama yang menjadikan keragaman iman dan keyakinan sebagai elemen fundamental dari identitas sosial bangsa. Situasi ini memerlukan adanya sistem komunikasi dan interaksi sosial yang dapat menghubungkan perbedaan dan memelihara harmoni antar pemeluk agama. Saat masyarakat dapat melaksanakan komunikasi antaragama dengan cara yang terbuka dan inklusif, maka keragaman akan menjadi aset sosial, bukan pemicu konflik.

Dalam banyak situasi, desa atau komunitas kecil yang terdiri dari berbagai agama menunjukkan bahwa toleransi tidak hanya diciptakan melalui peraturan resmi negara atau lembaga besar, melainkan juga melalui interaksi sehari-hari, tradisi lokal, dan komunikasi informal di antara warga. Maka dari itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana komunikasi antaragama dilakukan pada tingkat komunitas lokal untuk menjaga kedamaian dan kerukunan sosial.

Dengan keberadaan lebih dari 1.300 suku bangsa, Indonesia menampilkan keberhasilan dalam menjaga prinsip toleransi di tengah kekayaan keragaman, yang menghasilkan dasar hidup berdampingan yang kuat. Melalui Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, pemerintah Indonesia rutin mengevaluasi kualitas interaksi antaragama di seluruh negeri melalui survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang

memiliki skala penilaian 1-100 berdasarkan tiga indikator; toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.



Gambar 1. Indeks Kerukunan

Hasil penelitian menunjukkan adanya kemajuan signifikan yang menggembirakan. Indeks KUB terdaftar di angka 73,09 pada tahun 2022, lalu mengalami peningkatan menjadi 76,02 di tahun 2023, dan mencapai 76,47 pada tahun 2024 beserta keberhasilan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Namun, data bersifat nasional tersebut tidak selalu mencerminkan realita di tingkat lokal, terutama di desa-desa atau komunitas kecil, di mana aspek sosial, budaya, dan agama bisa sangat berbeda. Ini menandakan bahwa masyarakat setempat memerlukan strategi komunikasi dan hubungan yang adaptif agar toleransi tidak hanya tercermin dalam statistik nasional, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

Salah satu tempat yang menarik untuk dianalisis adalah Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, yang juga dikenal dengan nama Kampung Buddha Sodong. Komunitas ini menunjukkan keragaman keyakinan, khususnya antara kelompok Buddha dan Muslim, yang saling hidup secara harmonis. Dalam berita terbaru, dilaporkan bahwa Kampung Buddha Sodong memiliki 62 kepala keluarga yang menganut agama Buddha. Namun, mayoritas masyarakat di area sekitarnya beragama Islam. Kehidupan bersama dalam keragaman ini mencerminkan bahwa toleransi dan hubungan antaragama terjalin tidak karena paksaan atau salah satu kelompok yang mendominasi, tetapi melalui komunikasi dan proses adaptasi budaya yang dilakukan oleh penduduk, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun saat momen keagamaan, seperti perayaan Waisak (Pebrianti, 2023a)

Sejarah keberadaan komunitas Buddha di Sodong menawarkan konteks yang signifikan. Berdasarkan catatan setempat, pengenalan agama Buddha ke Dusun Sodong terjadi pada awal tahun 1950-an oleh seorang warga bernama Mbah Saimin setelah dia mempelajari ajaran Buddha dari luar wilayahnya. Sebelum itu, masyarakat lokal memeluk kepercayaan tradisional akan tetapi seiring berjalannya waktu, komunitas Buddha mulai terbentuk dan hidup berdampingan dengan masyarakat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman agama di Sodong bukan sekadar akibat migrasi yang baru-baru ini terjadi, tetapi merupakan bagian dari sejarah komunitas yang telah ada selama puluhan tahun. Keunikan ini menjadikan

Sodong sebagai contoh nyata keragaman agama di pedesaan Jawa: bukan sekadar keseragaman, tetapi koeksistensi yang telah berlangsung lama (Pebranti, 2023b)

Dalam konteks interaksi antaragama, pendekatan komunikasi berperan krusial dalam memastikan bahwa dua kelompok yang berbeda dapat menjaga kedamaian. Pendekatan komunikasi *co-cultural* menggarisbawahi interaksi antara kelompok minoritas dan mayoritas yang dilakukan lewat metode komunikasi yang adaptif, saling menghargai, dan memperhitungkan latar belakang budaya masing-masing. Menurut (Farid & Hakimi, 2025) dalam karya mereka mengenai *Intercultural Communication Strategies for Sustainable Conflict Resolution in Indonesia* menguraikan bahwa strategi komunikasi antarbudaya mencakup tiga tahap utama: meningkatkan kesadaran serta sensitivitas budaya, mempromosikan dialog yang inklusif, dan merumuskan solusi secara kolaboratif.

Ketiga aspek tersebut dianggap sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya konflik dan mempertahankan keberadaan secara damai dalam komunitas yang beraneka ragam. Penelitian ini mengindikasikan bahwa saat komunikasi dilaksanakan dengan pendekatan yang inklusif dan menghormati perbedaan budaya, hubungan antaragama mampu tetap harmonis meskipun ada perbedaan dalam keyakinan

Hierarki kekuasaan menunjukkan ketidakseimbangan posisi antara kelompok mayoritas dan minoritas yang berpengaruh terhadap siapa yang lebih dominan dalam berbicara, didengarkan, dan menciptakan makna

dalam interaksi sosial. Dalam konteks hubungan antara Islam dan Buddha di Dusun Sodong, situasi mayoritas dan minoritas dapat menciptakan perbedaan kekuasaan yang tersembunyi, sehingga menjadikan kelompok minoritas lebih rentan dalam hal representasi di publik.

Beberapa literatur mengenai komunikasi lintas budaya menunjukkan bahwa tanpa pengakuan atas ketidakseimbangan kekuasaan, praktik toleransi sering kali hanya bersifat simbolik dan tidak menciptakan hubungan yang setara (Wazdy et al., 2024). Maka dari itu, strategi *co-cultural* di desa harus mencakup langkah-langkah untuk mengurangi jarak kekuasaan, termasuk partisipasi yang setara dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan suara kelompok minoritas benar-benar dipertimbangkan.

Pendekatan ini sangat terkait dengan komunitas yang memiliki variasi dalam hal agama, budaya, dan identitas terutama ketika terlihat adanya perbedaan kekuasaan antar kelompok mayoritas dan minoritas. Dalam kajian mengenai teori penyesuaian budaya, Teori *Co-Cultural* menawarkan kerangka pemahaman bahwa kelompok “*co-cultural*” (yaitu kelompok minoritas atau kelompok yang memiliki budaya berbeda dari yang dominan) sering kali berada dalam posisi terpinggirkan dalam struktur sosial, sehingga mereka perlu memilih pendekatan komunikasi tertentu seperti kompromi atau perundingan untuk berinteraksi dengan kelompok yang lebih dominan.

Dalam konteks di mana keberadaan dominasi budaya atau agama dapat menimbulkan stereotip, sikap prejudis, atau kesalahan dalam pemahaman, metode komunikasi *co-cultural* menjadi krusial agar suara-suara dari kelompok minoritas dapat didengar, identitas mereka dihargai, dan ruang dialog tetap terbuka. Dalam lingkungan beragam agama seperti komunitas Islam dan Buddha di Dusun Sodong, variasi dalam identitas spiritual dan budaya dapat membentuk dinamika “majoritas-minoritas” yang berisiko menimbulkan ketegangan tanpa adanya usaha komunikasi yang peka.

Oleh karena itu, ketika merancang strategi komunikasi, penting untuk mempertimbangkan elemen-elemen kekuasaan struktural, lapisan sosial, dan kebutuhan untuk mendapatkan representasi yang adil untuk semua kelompok. Di sinilah peran publikasi komunitas, melalui perantara sosial, tokoh agama, atau panitia setempat, tampil sebagai penghubung dialog, mediator, dan penyampai pesan antarbudaya.

Meskipun ada banyak penelitian yang telah membahas komunikasi antaragama dan praktik toleransi di berbagai wilayah, studi yang secara khusus menelaah strategi komunikasi *co-cultural* dalam interaksi antara umat Buddha dan Islam di desa kecil seperti Dusun Sodong masih sangat sedikit. Kebanyakan studi lebih memusatkan perhatian pada dialog antaragama yang terjadi di tingkat kota atau di komunitas besar, atau pada hubungan antaragama yang mencakup komunitas Islam dan Kristen atau

Islam dan Hindu, sementara dinamika umat Buddha yang merupakan minoritas di pedesaan Jawa hampir tidak mendapat perhatian.

Selain itu, belum ada kajian yang secara spesifik menyelidiki bagaimana struktur hierarki mayoritas dan minoritas, cara adaptasi dalam komunikasi, serta pengalaman budaya setempat mempengaruhi pola interaksi di dusun tersebut. Kesenjangan ini menandakan bahwa kajian tentang strategi komunikasi *co-cultural* di Dusun Sodong tidak hanya penting, tetapi juga sangat diperlukan untuk memperkaya pustaka komunikasi antarbudaya di Indonesia.

Dalam konteks kesenjangan penelitian yang ada, penulis merasa terdorong untuk menggali lebih dalam bagaimana strategi komunikasi *co-cultural* diterapkan dalam hubungan antaragama di Dusun Sodong. Oleh karena itu, studi ini diberi judul: “Strategi Komunikasi *Co-Cultural* Pada Interaksi Masyarakat Buddha (Minoritas) Terhadap Masyarakat Islam (Mayoritas) Di Dusun Sodong, Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.”

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah ditulis oleh penulis di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana strategi komunikasi *co-cultural* pada interaksi masyarakat Buddha (minoritas) terhadap masyarakat Islam (majoritas) di Dusun Sodong, Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi co-cultural pada interaksi masyarakat Buddha (minoritas) terhadap masyarakat Islam (majoritas) di Dusun Sodong, Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi antarbudaya dan teori co-cultural dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana kelompok mayoritas dan minoritas berstrategi dalam berinteraksi di lingkungan pedesaan yang multireligi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tokoh lokal sebagai acuan untuk membangun pola komunikasi yang lebih inklusif dan efektif guna menjaga keharmonisan hubungan antara umat Buddha dan Islam di Dusun Sodong.